

ABSTRACT

Tax is one important source of state revenue to advance the state revenue. The company is recognized as a business entity required to withhold income tax of Article 21 of its employees. The purpose of this study was to determine whether there are significant differences PPh amount payable according to Article 21 of Law No Income Tax. 17 of 2000 with No Income Tax Act. 36 of 2008. From both the Income Tax Act, will be compared between the four alternative policy is a policy Article 21 Income Tax which is borne by the employee, is borne by the company, supported by the company, and the gross-up.

Based on the results of the study were PT. "X" has been applied Article 21 supported the policy of the company. The amount of income tax payable for income tax policies of Article 21 which is supported by the company are considered more profitable company because the company pays less tax, while the difference between fiscal costs and commercial costs to be borne by the company are also smaller when compared with the third alternative.

This study uses a method of testing hypotheses. Data taken from the payroll of employees in the production and marketing of PT "X". Data were analyzed using Paired Samples T Test. The results showed that there was a significant difference between the amount of income tax payable according to Law no. 17 of 2000 by Act no. 36 of 2008. The author concludes that the application of Article 21 Income Tax policy is supported by the company more profitable than the application of Article 21 Income Tax policy covered employees, covered companies, and in gross-ups. The author recommends continued to support companies to implement the policy of Article 21 supported corporate income tax that has been applied to the company.

Keywords: Income Tax Act No. 36 In 2008, Income Tax Act No. 17 In 2000, income tax payable

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk memajukan pendapatan negara. Perusahaan yang diakui sebagai kesatuan usaha diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21 atas karyawannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Pasal 21 terutang menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 dengan cara membandingkan antara keempat alternatif kebijakan PPh Pasal 21 yaitu kebijakan yang ditanggung oleh pegawai, ditanggung oleh perusahaan, ditunjang oleh perusahaan, dan di *gross-up*.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata PT. "X" selama ini menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan. Jumlah pajak penghasilan terutang untuk kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan dianggap lebih menguntungkan perusahaan karena perusahaan membayar pajaknya lebih kecil, sedangkan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung oleh perusahaan juga lebih kecil bila dibandingkan dengan ketiga alternatif lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode pengujian hipotesis. Data diambil dari daftar gaji karyawan bagian produksi dan pemasaran di PT "X". Data dianalisis dengan menggunakan *Paired Samples T Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pajak penghasilan terutang menurut UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan lebih menguntungkan daripada penerapan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, ditanggung perusahaan, dan di *gross-up*. Penulis menyarankan tetap mendukung perusahaan untuk menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan yang selama ini diterapkan perusahaan.

Kata Kunci: UU PPh No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan terutang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	9

2.1.1.3	Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.1.4	Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.1.5	Teori Pemungutan Pajak	14
2.1.1.6	Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.1.7	Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil	17
2.1.1.8	Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak	18
2.1.1.9	Hambatan Pemungutan Pajak	19
2.1.1.10	Tarif Pajak	20
2.1.1.11	Jenis Pajak	22
2.1.2	Pajak Penghasilan (PPh)	24
2.1.2.1	Pengertian PPh	24
2.1.2.2	Subjek Pajak	25
2.1.2.3	Bukan Subjek Pajak	29
2.1.2.4	Objek Pajak	30
2.1.2.5	Penghasilan yang Dipotong Pajak Bersifat Final	35
2.1.2.6	Bukan Objek Pajak	36
2.1.2.7	Biaya-Biaya dalam Perhitungan PPh	39
2.1.3	PPH Pasal 21	41
2.1.3.1	Pengertian	41
2.1.3.2	Wajib Pajak PPh Pasal 21	42
2.1.3.3	Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21	44
2.1.3.4	Objek Pajak PPh Pasal 21	44
2.1.3.5	Tidak Termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21	47
2.1.3.6	Pemotong Pajak PPh Pasal 21	47

2.1.3.7	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21	49
2.1.3.8	Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 .	51
2.1.3.9	Pengurangan yang Diperbolehkan	53
2.1.3.10	SPT (Surat Pemberitahuan).....	57
2.1.3.11	Nomor Pokok Wajib Pajak	59
2.1.4	Perbandingan UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.....	60
2.1.4.1	Subjek Pajak (Pasal 2 Ayat 5).....	60
2.1.4.2	Objek Pajak.....	61
2.1.4.3	Pengecualian dari Objek Pajak (Pasal 4 Ayat 3).....	63
2.1.4.4	Biaya Pengurang Penghasilan Bruto.....	65
2.1.4.5	Isteri yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri (Pasal 8 Ayat 2)	67
2.1.4.6	Norma Penghitungan Penghasilan Netto (Pasal 14 Ayat 2).....	67
2.1.4.7	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	68
2.1.4.8	Tarif Pajak.....	68
2.1.4.9	Pencegahan Penghindaran Pajak (Pasal 18).....	70
2.1.4.10	Pemotongan/Pemungutan	71
2.1.4.11	Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 24).....	73
2.1.4.12	Angsuran Pajak Tahun Berjalan (Pasal 25)	74
2.1.4.13	Ketentuan Perpajakan Pertambahan dan Syariah (Pasal 31D).....	74
2.1.4.14	Fasilitas Perpajakan Bagi UMKM (Pasal 31E)	75

2.1.5 Perencanaan Pajak	75
2.1.5.1 Aspek-Aspek dalam <i>Tax Planning</i>	76
2.1.5.2 Gross Up Tax – Indonesia Income Tax (PPh 21)	77
2.1.6 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21	81
2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.....	84
2.3 Hipotesis	86

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian.....	88
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	88
3.1.2 Struktur Organisasi	92
3.1.3 Uraian Tugas dalam PT “X”	93
3.2 Metode Penelitian	95
3.2.1 Jenis Penelitian.....	96
3.2.2 Operasionalisasi Variabel	96
3.2.3 Populasi Penelitian.....	97
3.2.4 Sampel Penelitian.....	97
3.2.5 Teknik Penarikan Sampel	97
3.2.6 Teknik Pengumpulan Data.....	98
3.2.7 Metode Analisis	99
3.2.8 Hipotesis	99
3.2.9 Pemilihan Tes Statistik dan Penghitungan Nilai Statistik	102

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	103
4.2 Hasil Perhitungan Data	105
4.2.1 Perhitungan Menurut UU No. 17 Tahun 2000.....	105
4.2.1.1 PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai (Dalam Rupiah)	105
4.2.1.2 PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan (Dalam Rupiah)	106
4.2.1.3 PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan (Dalam Rupiah)	107
4.2.1.4 PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i> (Dalam Rupiah)	108
4.2.2 Perhitungan Menurut UU No. 36 Tahun 2008.....	109
4.2.2.1 PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai (Dalam Rupiah)	109
4.2.2.2 PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan (Dalam Rupiah)	110
4.2.2.3 PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan (Dalam Rupiah)	111
4.2.2.4 PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i> (Dalam Rupiah)	112
4.2.3 Cara Perhitungan Data	113
4.2.3.1 Perhitungan Menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 ..	113
4.2.3.1.1 PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai.....	113
4.2.3.1.2 PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	113
4.2.3.1.3 PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan.....	114
4.2.3.1.4 PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i>	114
4.2.3.2 Perhitungan Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 ..	115
4.2.3.2.1 PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai.....	115
4.2.3.2.2 PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	115
4.2.3.2.3 PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan.....	116
4.2.3.2.4 PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i>	116

4.3 Penerapan Kebijakan PPh Pasal 21 dan Pengaruhnya terhadap PPh Terutang	117
4.4 Penerapan Kebijakan PPh Pasal 21 dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Laba Perusahaan.....	125
4.5 Pemilihan Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21.....	135
4.6 <i>Paired Samples T Test</i>	141
4.7 Pembahasan.....	142

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	144
5.2 Saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA	147
----------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	149
---------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	86
Gambar 2 Struktur Organisasi PT “X”.....	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	PTKP UU No. 36 Tahun 2008..... 56
Tabel II	Tarif UU No. 36 Tahun 2008 56
Tabel III	Perbandingan Subjek Pajak UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 60
Tabel IV	Perbandingan Objek Pajak UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 61
Tabel V	Perbandingan Pengecualian Objek Pajak UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008..... 63
Tabel VI	Perbandingan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 65
Tabel VII	Perbandingan Isteri yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008..... 67
Tabel VIII	Perbandingan Norma Penghitungan Penghasilan Netto UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 67
Tabel IX	Perbandingan PTKP UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 68
Tabel X	Tarif WPOP UU No. 17 Tahun 2000 68
Tabel XI	Tarif WPOP UU No. 36 Tahun 2008 69
Tabel XII	Tarif WP Badan UU No. 17 Tahun 2000 69
Tabel XIII	Perbandingan Tarif Wajib Pajak Perseroan Terbuka dan Tarif Dividen UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 70
Tabel XIV	Perbandingan Pencegahan Penghindaran Pajak UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008..... 70
Tabel XV	Perbandingan Tarif Non NPWP dengan NPWP..... 71
Tabel XVI	Perbandingan Saat Terutang UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 72

Tabel XVII	Perbandingan Objek PPh Pasal 22 UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008.....	72
Tabel XVIII	Perbandingan Tarif PPh Pasal 23 UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008.....	72
Tabel XIX	Perbandingan Objek Pasal 26 UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008	73
Tabel XX	Perbandingan Kredit Pajak Luar Negeri UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008.....	73
Tabel XXI	Perbandingan Angsuran Pajak Tahun Berjalan UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008.....	74
Tabel XXII	Perbandingan Ketentuan Perpajakan Pertambangan dan Syariah UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008	74
Tabel XXIII	Perbandingan Fasilitas Perpajakan Bagi UMKM UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008.....	75
Tabel XXIV	Daftar Gaji Karyawan Bagian Produksi	103
Tabel XXV	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai.....	105
Tabel XXVI	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan.....	106
Tabel XXVII	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan.....	107
Tabel XXVIII	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i>	108
Tabel XXVIX	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai.....	109
Tabel XXX	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan.....	110
Tabel XXXI	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan.....	111
Tabel XXXII	Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i>	112

Tabel XXXIII	Perhitungan PPh Terutang Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai/Perusahaan	119
Tabel XXXIV	Perhitungan PPh Terutang Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan.....	120
Tabel XXXV	Perhitungan PPh Terutang Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i>	121
Tabel XXXVI	Perhitungan PPh Terutang Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai/Perusahaan	122
Tabel XXXVII	Perhitungan PPh Terutang Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan.....	123
Tabel XXXVIII	Perhitungan PPh Terutang Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i>	124
Tabel XXXIX	Perhitungan Laporan Laba Rugi Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai.....	127
Tabel XL	Perhitungan Laporan Laba Rugi Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan.....	128
Tabel XLI	Perhitungan Laporan Laba Rugi Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan.....	129
Tabel XLII	Perhitungan Laporan Laba Rugi Menurut UU No. 17 Tahun 2000, Kebijakan PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i>	130
Tabel XLIII	Perhitungan Laporan Laba Rugi Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai.....	131
Tabel XLIV	Perhitungan Laporan Laba Rugi Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan.....	132
Tabel XLV	Perhitungan Laporan Laba Rugi Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan.....	133
Tabel XLVI	Perhitungan Laporan Laba Rugi Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Kebijakan PPh Pasal 21 Di <i>Gross-Up</i>	134
Tabel XLVII	Perhitungan <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersial Setahun, menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000	136

Tabel XLVIII	Perhitungan <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersial Setahun, menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008	136
Tabel XLVIX	Ikhtisar <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersial, dan selisihnya, Laba Sebelum Pajak dan Pajak Penghasilan Terutang, menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000	138
Tabel L	Ikhtisar <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal, Biaya Komersial, dan selisihnya, Laba Sebelum Pajak dan Pajak Penghasilan Terutang, menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008	138